

STRATEGI LITERASI POLITIK UNTUK MENDUKUNG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

POLITICAL LITERATION STRATEGY TO SUPPORT VILLAGE COMMUNITY WELFARE

Deden Mauli Darajat

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Humaniora
Universitas Darussalam Gontor
Jl. Raya Siman KM 7, Ponorogo, Indonesia
E-mail: kangdedenmd@gmail.com

Muhtadi

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Cempaka Putih Ciputat Timur Tangerang Selatan Banten 15412, Indonesia
E-mail: muhtadi@uinjkt.ac.id

Abstrak

Kesejahteraan masyarakat desa pada umumnya belum sepenuhnya merata. Program-program kesejahteraan untuk masyarakat masih perlu ditingkatkan mengenai dampaknya bagi kemakmuran warga. Salah satunya bahwa program-program kesejahteraan belum terkomunikasikan secara masif dan benar. Oleh karena itu, kampanye literasi politik di desa menjadi penting dalam upaya kesejahteraan masyarakat desa. Untuk itu diperlukan berbagai strategi dan pendekatan dalam proses kampanye literasi politik di desa. Kesejahteraan sosial di masyarakat desa melalui literasi politik menjadi tumpuan agar Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi mandiri. Artikel ini merupakan sebuah kajian literatur yang akan membahas bagaimana strategi literasi politik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Strategi kesejahteraan sosial melalui pendekatan literasi politik di kalangan masyarakat desa dapat dilakukan dengan sepuluh tawaran pendekatan yakni kerjasama Pemerintah Desa, merangkul tokoh masyarakat, melibatkan pendamping dari program-program pemberdayaan sosial membuat agen literasi, pendekatan Organisasi Kemasyarakatan, pendekatan kearifan lokal, tatap muka informal, pendekatan kegiatan masyarakat, saluran media massa di desa, dan media sosial. Strategi literasi merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan pemahaman yang komprehensif bagi masyarakat tentang program-program kesejahteraan sosial di desa. Pendekatan ini dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat desa untuk keberhasilan program-program kesejahteraan di lingkungan pedesaan.

Kata Kunci: literasi politik, strategi, desa, kesejahteraan.

Abstract

In general, the welfare of the village community has not been fully well-distributed. Welfare programs for the community still need to be improved regarding their impact on the welfare of citizens. One of them is that welfare programs have not been communicated massively and correctly. Therefore, the political literacy campaign in the village is important in the efforts of the welfare of the village community. For this reason, various strategies and approaches are needed in the political literacy campaign process in the village. Social welfare in rural communities through political literacy is the foundation for the Unitary State of the Republic of Indonesia to become independent. This article is a literature review that will discuss political literacy strategies to support the welfare of rural communities. A social welfare strategy through a political literacy

approach among rural communities can be carried out with ten approaches, namely the Village Government cooperation, embracing community leaders, involving assistants from social empowerment programs to make literacy agents, the Community Organization approach, local wisdom approaches, informal face-to-face, approach to community activities, mass media channels in the village, and social media. The literacy strategy is a solution to increase a comprehensive understanding for the community about social welfare programs in the village. This approach can foster village community participation for the success of welfare programs in rural areas.

Keywords: *political literacy, strategy, village, welfare.*

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat desa merupakan tugas konstitusi yang perlu dilaksanakan oleh para pengampu kebijakan serta didukung oleh seluruh komponen masyarakat lainnya. Pembangunan kesejahteraan masyarakat desa merupakan keniscayaan yang mesti dijalankan oleh pihak-pihak yang terpenggil untuk melakukan kegiatan yang memandirikan masyarakat desa. Salah satu kegiatan pembangunan kesejahteraan desa yang dapat dilakukan melalui mekanisme literasi politik.

Sebagaimana dikatakan Denver dan Hands (dalam Karim et al., 2015) literasi politik adalah bahwa warga masyarakat itu memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan isu-isu politik salah satu kebijakan dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Berangkat dari pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh warga masyarakat akan tumbuh partisipasi secara aktif dalam salah satu isu-isu politik yakni kebijakan dan pembangunan kesejahteraan sosial.

Pada konteks ini literasi politik ditujukan pada isu-isu politik kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena ada sebagian besar program-program kesejahteraan di desa yang minim literasi politik, maka akhirnya program-program kesejahteraan untuk masyarakat desa minim partisipasi dan berimplikasi rendahnya dampak pada peningkatan kemandirian ekonomi dari masyarakat desa. Pada intinya literasi politik

dalam kegiatan masyarakat desa adalah dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat untuk pembangunan kesejahteraan sosial di desanya. Partisipasi masyarakat yang tinggi akan menumbuhkan pengelolaan yang efektif dan efisien terhadap program-program kesejahteraan masyarakat desa.

Literasi politik memiliki posisi strategis untuk pembangunan kesejahteraan sosial di pedesaan. Kampanye literasi politik kemudian menjadi keniscayaan untuk membangun kesadaran masyarakat terlebih di kalangan desa. Minimnya sarana dan prasarana yang ada di desa menjadikan usaha dalam mengampanyekan literasi politik harus menyesuaikan dengan kondisi yang serba keterbatasan tersebut. Beberapa metode dan pendekatan telah dikembangkan untuk memahami masalah dan membantu merumuskan kebijakan guna memecahkan masalah pembangunan pedesaan (Chambers, 1996).

Salah satu tuntutan reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998 adalah dibangunnya suatu sistem ketatanegaraan Indonesia yang berbasis secara murni dan konsekuen pada paham “kedaulatan rakyat” dan “negara hukum”. Masyarakat desa harus tersentuh dengan pemahaman tentang literasi politik sebagai bagian dari warga negara dan mengusung kedaulatan rakyat. Memahami masyarakat desa merupakan pijakan awal bagaimana kegiatan literasi politik dapat dilakukan di kalangan masyarakat. Oleh karena

kampanye literasi politik harus memiliki strategi dan model-model kampanye.

Merujuk pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat 1, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kesejahteraan masyarakat merupakan agenda prioritas dalam penggunaan Dana Desa. Sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pasal 5 ayat 2, prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa: a. peningkatan kualitas hidup; b. peningkatan kesejahteraan; c. penanggulangan kemiskinan; dan d. peningkatan pelayanan publik.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, di Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU RI 2009) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait pembagian kewenangan pemerintah daerah (UU RI 2014a).

Marthen L. Kimbal (2018) menulis artikel tentang partisipasi politik dalam proses pembangunan desa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat pendidikan politik masih sangat rendah dan pendidikan politik dianggap sebagai alternatif untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat desa dalam demokrasi.

Sejatinya permasalahan desa sudah menjadi perhatian pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 112 ayat (3) mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa; meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa.

Pelaksanaan pendampingan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 128 menyatakan bahwa pendampingan desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah di kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional.

Sementara itu, strategi literasi politik mengenai program-program sosial dalam upaya perubahan dalam kesejahteraan masyarakat desa sangat diperlukan. Perubahan adalah keniscayaan untuk menjadi lebih baik (Darajat, 2018). Perubahan inilah yang diinginkan sehingga literasi politik dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa.

Strategi literasi politik dalam program kesejahteraan sosial diperlukan karena berkaitan dengan sosialisasi program sehingga masyarakat dapat memiliki pemahaman yang komprehensif dan menumbuhkan partisipasi mereka untuk keberhasilan kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial yang diinisiasi pemerintah. Literasi politik untuk menyejahterakan masyarakat desa dapat dimulai dengan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa masyarakat memiliki hak untuk membantu pemerintah desa menyusun

segala kebutuhan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) melalui keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan penyampaian aspirasi melalui perangkat dusun, RT maupun RW, sehingga segala kebutuhan masyarakat desa dapat teraplikasikan melalui program-program kerja desa dalam anggaran Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD). Sehingga unsur-unsur masyarakat Desa seperti Kepala Dusun, RT, RW, tokoh adat maupun tokoh agama dan pemuda memiliki peran serta secara politik anggaran desa untuk membantu aparat pemerintah desa merencanakan program kerja khususnya yang bertujuan menyejahterakan masyarakat desa. Terkait hal Dana Desa segala alokasi kebutuhan masyarakat desa dapat dibantu oleh Pendamping Desa sehingga penyampaian hak masyarakat desa ini dapat dipantau atau dimonitoring oleh Pendamping Desa.

Dalam pelaksanaan strategi literasi politik diimplementasikan sepuluh tawaran pendekatan yakni kerjasama Pemerintah Desa, merangkul tokoh masyarakat, melibatkan pendamping program pemberdayaan sosial membuat agen literasi, pendekatan Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pendekatan kearifan lokal, tatap muka informal, pendekatan kegiatan masyarakat, saluran media massa di desa, dan media sosial. Artikel ini juga akan membahas tentang apa faktor pendukung dan faktor penghambat berjalannya strategi literasi.

PEMBAHASAN

Difusi Inovasi

Kampanye literasi politik merupakan upaya untuk mengubah masyarakat. Oleh sebab itu pendekatan teori jelas sangat dibutuhkan. Dalam makalah ini penulis ingin mengangkat teori yang relevan untuk perubahan di kalangan desa yaitu teori difusi inovasi.

Teori ini diperkenalkan oleh ilmuwan komunikasi termasyhur yaitu, Everett M. Rogers pada tahun 1964 melalui bukunya yang berjudul *Diffusion of Innovations*. Difusi inovasi menurut Rogers dan Shoemaker (dalam Nasution, 2002) menyebutkan bahwa difusi sebagai proses di mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Inovasi merupakan ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh manusia. Teori ini meyakini bahwa sebuah inovasi terdifusi ke seluruh masyarakat dalam pola yang bisa diprediksi.

Beberapa kelompok orang akan mengadopsi sebuah inovasi segera setelah mereka mendengar inovasi tersebut. Sedangkan beberapa kelompok masyarakat lainnya membutuhkan waktu lama untuk kemudian mengadopsi inovasi tersebut. Salah satu tahapan yang menciptakan proses difusi inovasi adalah mempelajari inovasi. Tahapan ini merupakan tahap awal ketika masyarakat mulai melihat, dan mengamati inovasi baru dari berbagai sumber. Pada tahapan ini, literasi politik berperan sebagai salah satu instrumen untuk mensosialisasikan program kesejahteraan sosial kepada masyarakat desa.

Pemberdayaan Politik

Kapasitas untuk menganalisis, mengatur, dan memobilisasi dalam pemberdayaan politik adalah tindakan kolektif yang dibutuhkan untuk perubahan kolektif. Hal ini sering dikaitkan dengan pendekatan berbasis hak untuk pemberdayaan warga negara untuk mengklaim hak mereka (Piron & Watkins dalam Luttrell et al. 2009).

Popularitas konsep pemberdayaan baru-baru ini telah membawa perhatian luas yang belum difokuskan membawa perubahan mendasar dalam praktik pembangunan. Beberapa kritik melangkah lebih jauh, menyarankan bahwa penggunaan istilah tersebut

memungkinkan organisasi untuk mengatakan bahwa mengatasi ketidakadilan mereka harus mendukung perubahan politik atau struktural, atau redistribusi sumber daya (Fiedrich et al. dalam Luttrell et al., 2009).

Kerangka yang dikembangkan oleh Longwe (dalam Luttrell et al., 2009) memberikan beberapa perbedaan yang berguna antara derajat yang berbeda dalam pemberdayaan (tingkatan derajat pemberdayaan):

1. “Derajat” kesejahteraan, di mana kebutuhan dasar terpenuhi. Ini tidak selalu membutuhkan penyebab struktural yang harus ditangani dan cenderung memandang mereka yang terlibat sebagai penerima pasif;
2. “Derajat” akses, di mana akses yang sama ke dalam bidang pendidikan, tanah dan kredit dijamin;
3. “Derajat” kesadaran dan peningkatan kesadaran, di mana struktur dan kelembagaan diskriminasi ditangani;
4. “Derajat” partisipasi dan mobilisasi, di mana pengambilan keputusan yang setara diaktifkan;
5. “Derajat” kontrol, di mana individu dapat membuat keputusan dan ini sepenuhnya diakui.

Kerangka Longwe menekankan pentingnya mendapatkan kendali atas keputusan dan sumber daya itu menentukan kualitas hidup seseorang dan menyarankan bahwa tingkat pemberdayaan yang “lebih rendah” merupakan prasyarat untuk mencapai yang lebih tinggi.

Pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah usaha terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi

sosial. Tujuan pengembangan kesejahteraan masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh (Achsanuddin et al., 2017).

Strategi Literasi Politik Program Kesejahteraan Sosial di Desa

Strategi kampanye lebih merupakan prinsip pemikiran yang dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan kampanye yang biasanya terjabar dalam berbagai langka taktis berdasarkan situasi dan kondisi lapangan (Heryanto & Rumaru 2013). Strategi kampanye literasi secara empiris dilakukan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana kampanye tersebut dilakukan. Untuk strategi kampanye literasi politik di desa sebaiknya harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana karakteristik desa. Untuk itu, di bawah ini akan dijabarkan bagaimana strategi literasi politik di kalangan desa, antara lain:

1. Kerjasama Pemerintah Desa

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa setidaknya mengubah pola dan gerakan pemerintah desa (Rusito, 2018). Dapat dikatakan bahwa kewenangan dan anggaran desa diperbesar sehingga desa bisa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis serta dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Desa yang sudah diperhatikan oleh pemerintah pusat merupakan energi yang positif yang harus dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk di dalamnya komunitas literasi politik. Para pegiat literasi politik harus mampu melihat peluang bahwa perhatian pemerintah terhadap desa harus dimaksimalkan bukan hanya untuk pembangunan desa secara fisik namun juga pembangunan sumber daya manusia (SDM) di desa. Sebab pembangunan

SDM lebih penting dan lebih bertahan lama daripada pembangunan secara fisik.

Salah satu pembangunan SDM yakni literasi politik. Salah satu strategi yang mungkin bisa kita lakukan adalah bekerja sama dengan pihak pemerintah desa dalam mengkampanyekan literasi politik program-program kesejahteraan sosial kepada masyarakat desa. Tentu kerjasama ini harus dimulai dengan melihat potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang dapat terjadi di sebuah desa yang akan dilaksanakan kerjasama dalam kampanye literasi politik. Misalnya, gagasan dan konsep kampanye disiapkan oleh komunitas atau pegiat literasi politik, lalu sarana dan prasarana dalam menyukseskan kampanye literasi politik ini disiapkan oleh pemerintah desa.

Salah satu poin utama dalam kampanye literasi politik di kalangan desa adalah bagaimana masyarakat memahami bahwa politik adalah instrumen terpenting dalam kehidupannya, seperti bagaimana dia hidup berbangsa dan bernegara ditentukan oleh sistem politik yang berlaku di sebuah negara tersebut. Kebijakan dan peraturan-peraturan pembangunan sosial bagian yang perlu dilakukan dalam literasi politik tersebut

Kita boleh melihat contoh dalam gerakan literasi yang digagas oleh John Wood yang mengembangkan ruang baca di berbagai negara belahan dunia. Wood mengisahkan dalam bukunya bahwa di suatu waktu di Sekolah Shree Janakalyan, di Kavresthali, dekat kota Pokhara, Nepal. Para siswa datang ke sekolahnya mereka mendapati sekolah itu kekurangan sumber daya pendidikan yang paling dasar, yaitu ruang kelas tanpa kertas, pensil, pulpen, atau buku. Namun kemudian situasi tersebut berubah ketika Wood datang dan membuat perpustakaan *Room to Read* ke-10.000 (Wood, 2014). Kegiatan Wood ini dilakukan lebih dari satu dekade. Ia mengungkapkan bahwa dari hanya lima menjadi

sepuluh ribu dalam satu dekade. Halaman Sekolah Shree Janakalyan, Nepal, kini dijejali ratusan siswa yang penuh kegairahan. Mereka bergiliran menggunakan perpustakaan baru mereka.

Kisah John Wood dengan *Room to Read* ini merupakan kisah kampanye dan gerakan literasi yang menggugah banyak orang, seperti orang kaya, pejabat pemerintah, dan komunitas filantropi. Sehingga gerakan literasi John Wood ini dapat dikembangkan dalam gerakan dan kampanye literasi politik bekerja sama dengan pemerintah desa untuk pembangunan pada sektor sosial misalnya penanggulangan kemiskinan di pedesaan.

Faktor pendukung untuk strategi kerja sama dengan Pemerintah Desa adalah bahwa Pemerintah Desa sudah memiliki anggaran yang dapat mengembangkan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat desa sejahtera. Meski begitu ada juga faktor penghambat, pertama, “oknum” di pemerintah desa yang enggan bekerja sama dengan masyarakat desa. Kedua, masyarakat acuh terhadap program dan kegiatan yang digulirkan oleh pemerintah desa. Maka sinergitas antara pemerintah desa dan masyarakatnya harus seiring seirama, sehingga masyarakat sejahtera.

2. Merangkul Tokoh Masyarakat

Strategi kedua dalam kampanye literasi politik adalah dengan merangkul tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat di sebuah desa biasanya adalah orang-orang yang berpengaruh terhadap kebiasaan dan budaya setempat, misalnya ulama. Di pedesaan, ulama atau kyai kerap kali petuahnya didengar oleh masyarakat. Sebab, kita hidup membutuhkan seorang yang menjadi teladan bagi kita, menjadi tolok ukur dalam melakukan berbagai hal.

Dalam hal kampanye literasi politik program kesejahteraan sosial, tokoh masyarakat

dapat melakukan kegiatan persuasif yang lebih mudah dalam mengemas kampanye literasi politik dengan cara yang paling menarik bagi masyarakat setempat (Heryanto, 2013). Misalnya jika ada permasalahan di antara tetangga, sebagian besar warga desa lebih memilih jalur kekeluargaan dengan mengundang tokoh-tokoh berpengaruh yang ada di masyarakat tersebut untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Mediasi yang dipimpin oleh orang yang disegani itu mudah diterima oleh orang-orang yang bersengketa.

Tokoh masyarakat, terlebih pada desa pedalaman sangat dihormati dan disegani. Misalnya di Kampung Citorek, Lebak, Banten, ketua adat dapat menentukan kapan dilakukannya tander di sawah-sawah yang dimiliki oleh masyarakat Citorek. Tidak ada salah seorangpun dari warga itu yang membangkang terhadap perintah ketua adat Citorek, walaupun masa panen di sebuah sawah sudah tiba saatnya, namun pemilik sawah lebih memilih menunggu arahan dari ketua adat setempat untuk memanen (Darajat, 2018). Ini menggambarkan bagaimana kekuatan tokoh masyarakat sangat berpengaruh terhadap kegiatan keseharian masyarakat.

Melihat kekuatan tokoh masyarakat begitu menonjol sehingga aktivis literasi politik harus mau merangkul tokoh masyarakat dalam mengampanyekan literasi politik. Tentu saja yang pertama yang harus dilakukan oleh pegiat literasi politik adalah mendekati dan memberi pemahaman dan pengertian terlebih dahulu apa itu literasi politik kepada tokoh masyarakat sebelum kegiatan kampanye literasi politik dilakukan. Hal ini senada dengan hasil riset bahwa peningkatan pengetahuan para perwakilan pranata sosial dalam menggali potensi dan memberikan solusi dalam permasalahan kesejahteraan sosial karena

kontribusi dan peranan tokoh masyarakat di tingkat lokal (Suhendi, 2013).

Faktor pendukung dalam strategi merangkul tokoh masyarakat adalah bahwa pertama, apa yang disampaikan tokoh masyarakat kerap kali didengar oleh masyarakat umum. Kedua, keberadaan tokoh masyarakat di tengah-tengah masyarakat juga penting dalam upaya menjalankan strategi ini. Meski demikian ada pula faktor penghambat untuk strategi ini, pertama, seberapa kuat tokoh masyarakat untuk meyakinkan masyarakatnya tentang pentingnya literasi politik. Kedua, ketiadaan tokoh masyarakat, sehingga strategi ini tidak akan berjalan.

3. Pelibatan Pendamping dari Program

Pelibatan pendamping program dapat berasal dari Kementerian Sosial yang memiliki pendamping program pemberdayaan sosial dan pendamping desa yang dimiliki oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT). Para pendamping dari dua kementerian ini yang mengerti dan memahami serta memiliki kompetensi untuk implementasi layanan program kesejahteraan masyarakat desa. Pelibatan para pendamping dalam literasi politik untuk kesejahteraan masyarakat desa itu penting. Karena mereka sudah profesional bagaimana melaksanakan proses layanan kesejahteraan sosial di desa.

Para pendamping ini merupakan agen literasi yang penting untuk memberikan pemahaman dan kompetensi kepada masyarakat desa mulai dari kebijakan, norma, aturan, tahapan implementasi, evaluasi, dan keberlanjutan dari program-program kesejahteraan sosial di desa tersebut. Pendamping dari Kementerian Sosial dan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi dapat berkolaborasi untuk melakukan kegiatan diskusi formal

maupun informal dengan masyarakat desa sebagai bentuk mengkomunikasi ide dan inovasi yang akan diimplementasikan di desa mereka.

Sebagaimana hasil riset (Wijaya, 2019) di mana pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan kegiatan literasi program tersebut melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk peningkatan pemahaman dari keluarga penerima manfaat (KPM). Kegiatan ini mendorong terbentuknya perubahan perilaku dari KPM untuk kehidupan mereka lebih sejahtera dari sisi ekonomi maupun kualitas diri.

Faktor pendukung strategi pelibatan pendamping ini adalah bahwa para pendamping bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Namun strategi ini tidak akan berjalan jika faktor penghambat lebih dominan, yaitu bahwa para pendamping minim kreativitas dalam menjalankan dan mengembangkan program-program kesejahteraan di masyarakat desa. Lebih jauh lagi bila para pendamping ini tidak bekerja sama sekali. Maka strategi ini tidak akan berjalan sama sekali.

4. Membuat Agen Literasi dari Mahasiswa, Karang Taruna dan Masyarakat

Robert Chambers dalam bukunya *Participatory Rural Appraisal (PRA)* atau memahami desa secara partisipatif mengemukakan bahwa masyarakat pedesaan dapat berbuat baik daripada orang luar. Sebuah kegiatan pelopor kemudian menjadi pengembangan penyebaran PRA dan pendekatan serta metode terkait yang dilakukan oleh orang desa itu sendiri (Chambers 1996).

Lebih lanjut Robert Chambers menyebutkan bahwa *The Aga Khan Rural Support Programme (AKRSP)* di India telah mengembangkan PRA lebih jauh. Pada akhir tahun 1980-an AKRSP telah mengembangkan

sukarelawan desa sebagai suatu pendekatan di mana warga desa dilatih sebagai fasilitator, baik untuk desa mereka sendiri ataupun untuk desa lain. Sukarelawan desa bukan hanya berfungsi sebagai penyuluh, melainkan juga memberikan fasilitasi metode dan pendekatan PRA. Para sukarelawan desa itu datang untuk memberikan layanan kepada warga desa yang siap membayar, baik itu dari desanya sendiri ataupun dari desa lain. Mereka juga mampu membentuk tim untuk melaksanakan latihan PRA di desa lain. Tim ini melaksanakan pelatihan di sejumlah desa yang meliputi pemetaan, pembuatan diagram, wawancara, diskusi kelompok tentang prioritas, dan persiapan rencana pengelolaan sumber daya alam yang ada di desa. Dari pengamatan tersebut terlihat bahwa mereka sangat menikmati dan menyukai proses itu (Chambers 1996).

Sukarelawan sebagai agen merupakan tim atau sekelompok orang yang konsentrasi terhadap literasi politik. Agen literasi politik pertama-tama harus terampil dalam upaya mengampanyekan materi-materi terkait literasi politik untuk program-program layanan sosial. Agen ini bukan hanya paham akan materi melainkan juga harus menguasai tentang metode dan kondisi di lapangan. Sebab, setiap desa memiliki karakter tersendiri yang harus dipelajari terlebih dahulu oleh agen-agen literasi program-program sosial.

Agen literasi politik dapat direkrut dari mahasiswa dan pemuda yang termasuk dalam kelas menengah terdidik. Mahasiswa-mahasiswa yang merupakan *agen of change* harus diterpa oleh pengetahuan akan pentingnya literasi politik yang termasuk dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian kepada Masyarakat. Menjadi agen literasi politik bagi mahasiswa merupakan salah satu bentuk dari pengabdian kepada masyarakat. Misalnya program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di

Perguruan Tinggi di Indonesia memuat materi tentang literasi politik untuk sosialisasi program atau layanan sosial untuk masyarakat miskin.

Hal yang kedua, pemuda yang terhimpun dalam Karang Taruna juga harus didekati untuk menjadi agen literasi sehingga kemanfaatan organisasi tersebut terasa lebih bermanfaat. Hal ini sebenarnya sudah dilakukan oleh anggota Karang Taruna berdasarkan hasil riset Suradi (2019) bahwa Karang Taruna telah menjadi agen perubahan dalam implementasi kegiatan sosial di antaranya bantuan pendidikan anak yatim, bantuan kebutuhan pokok bagi orang miskin, dan perbaikan rumah bagi keluarga miskin dan lain sebagainya yang dilaksanakan pada tingkat komunitas atau masyarakat. Sebagaimana hasil yang menyatakan bahwa Karang Taruna telah berperan dan berkontribusi peningkatan pendapatan penyandang disabilitas (Taqwarahman et al., 2017).

Ketiga, masyarakat di tingkat lokal dapat dijadikan sebagai agen literasi untuk program atau layanan sosial. Mereka dapat menjadi agen-agen lokal yang dapat mensosialisasikan misalnya Program Keluarga Harapan (PKH). Sehingga program ini dapat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat di desa untuk kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial. Mereka ini yang akan mengkomunikasikan perihal program sosial yang ada di masyarakat kepada warganya sehingga tumbuh pemahaman dan pengetahuan mereka yang selanjutnya partisipasi pun meningkat.

Faktor pendukung dalam strategi ini adalah mahasiswa selalu tampil di depan dalam perubahan masyarakat. Lebih lanjut, perguruan tinggi juga memiliki program Kuliah Kerja Nyat yang mewajibkan mahasiswa untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat. Faktor pendukung lainnya adalah pemuda karang taruna yang dapat diandalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

lebih dari itu, masyarakat sendiri juga dapat diberdayakan untuk menjadi agen literasi ini.

Faktor yang dapat menghambat dalam strategi ini adalah pertama mahasiswa tidak selalu hadir di tengah masyarakat. Apalagi program Kuliah Kerja Nyata juga tidak selalu di tempat yang sama dan hanya dilakukan dalam waktu sekitar satu bulan. Kedua, Karang Taruna yang tidak begitu aktif bahkan pasif tidak akan dapat diandalkan menjadi agen literasi. Ketiga, masyarakat desa yang enggan untuk berpikir dan bergerak sebagai agen literasi.

5. Pendekatan Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan yang biasa disebut dengan ormas yang telah berdiri sebelum kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini masih eksis diantaranya Muhammadiyah yang lahir pada tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama (NU) yang berdiri pada tahun 1926. Pengurus organisasi Muhammadiyah dan NU tersebut tersebar hingga pelosok-pelosok nusantara, bahkan terdapat pengurus cabang istimewa di berbagai negara di dunia. Keberadaan ormas Muhammadiyah dan NU di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan negara. Ormas-ormas ini berjasa dalam menjadikan Bangsa Indonesia merdeka, kekuatan ormas seperti Muhammadiyah dan NU ini bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi seperti sekolah-sekolah, rumah sakit, dan lembaga filantropi.

Masyarakat percaya terhadap organisasi ini ditandai dengan eksisnya ormas-ormas ini walaupun usianya lebih dari 100 tahun. Kepercayaan masyarakat terhadap ormas-ormas ini harus dijadikan pijakan dalam mengampanyekan literasi politik. Strategi kampanye literasi politik di kalangan desa dapat dilakukan dengan pendekatan ormas-ormas yang berpengaruh di masyarakat desa setempat. Pengaruh ormas dalam budaya di pedesaan memudahkan dalam memobilisasi masyarakat dalam menyebarkan pemahaman literasi politik

tentang norma dan implementasi program-program kesejahteraan, misalnya Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Faktor pendukung dalam strategi ini adalah ormas yang terpanggil untuk melakukan literasi politik guna kesejahteraan masyarakat desa. Meski demikian ormas juga terkadang tidak hadir di tengah masyarakat. Ini yang menjadikan faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi pendekatan organisasi kemasyarakatan.

6. Pendekatan Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan panduan bagi warga desa dalam melestarikan nilai-nilai yang telah melekat dalam budaya setempat. Layaknya budaya, kearifan lokal sudah terstruktur, mapan, dan terpola. Sehingga semuanya harus tunduk terhadap kearifan lokal termasuk Kepala Desa. Walaupun Kepala Desa memiliki hak yang besar dalam menentukan kebijakan di desanya. Bahkan negara pun harus tunduk kepada aturan kearifan lokal ini.

Dengan demikian dalam mengampanyekan literasi politik di kalangan desa kita harus memiliki strategi dengan mencermati kearifan lokal setempat. Sehingga kampanye literasi politik ini tepat sasaran dan program-program sosial dapat dilaksanakan dan memberikan kemanfaatan ekonomi maupun sosial bagi penerima manfaat program.

Kearifan lokal ini merupakan faktor penting agar program dan layanan kesejahteraan sosial dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Oleh karena itu perlu diperhatikan secara seksama dan detail penggunaan dan pemanfaatan kearifan lokal sebagai bagian dari kegiatan literasi bagi kebijakan dan pembangunan kesejahteraan di masyarakat desa. Karena kearifan lokal ini akan berkontribusi positif bagi tumbuhnya pemahaman dan

partipasi masyarakat dalam kegiatan program program sosial untuk kesejahteraan warga desa.

Kearifan lokal yang dijunjung tinggi di tengah masyarakat desa adalah faktor pendukung untuk terselenggaranya strategi pendekatan kearifan lokal ini. Sementara itu masyarakat yang acuh terhadap kearifan lokal akan menjadi sia-sia karena hal ini adalah faktor penghambat dalam kesuksesan penyelenggaraan strategi pendekatan kearifan lokal.

7. Tatap Muka Informal

Struktur wawancara tatap muka informal merupakan saluran yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan politik (Heryanto & Rumar, 2013). Saluran tatap muka informal dalam arti tidak terikat dalam struktur formal bersifat bebas namun tidak semua orang dapat akses ke saluran ini dalam keadaan yang sama, mereka yang dapat mengakses melalui saluran informal ini biasanya akan lebih banyak memperoleh informasi ketimbang yang tidak memiliki akses.

Strategi tatap muka informal dalam kampanye literasi politik dapat digunakan untuk mempersuasi warga desa yang belum memiliki pemahaman terkait literasi politik. Jika strategi ini dilakukan dengan menemukan orang yang tepat, artinya dia memiliki pengaruh yang besar terhadap minimal keluarga besarnya atau masyarakat di sekitarnya, maka kampanye literasi politik akan menghasilkan nilai positif. Dengan demikian sebagai pegiat literasi politik kita harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi orang-orang yang berpengaruh di kalangan desa yang bukan termasuk dalam tokoh-tokoh masyarakat secara formal. Orang-orang yang berpengaruh ini diharapkan dapat menjadi agen literasi sekaligus sosialisasi Program Keluarga Harapan, Sarana Prasarana Lingkungan (SARLING) dan lainnya.

Faktor pendukung dalam strategi tatap muka informal adalah keterpanggilan agen literasi dalam memperbincangkan literasi politik dengan strategi tatap muka informal. Faktor penghambatnya adalah bahwa strategi ini tidak akan berjalan jika perbincangan tentang literasi politik dengan tatap muka informal tidak dilakukan secara maksimal.

8. Pendekatan Kegiatan Kemasyarakatan

Di pedesaan dapat kita temukan kerja bakti, sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk menyukseskan kegiatan 17 Agustus misalnya. Dalam pertemuan warga pada kegiatan kemasyarakatan ini dapat disisipkan nilai-nilai kebersamaan dengan pendekatan literasi politik.

Selain itu juga tahlilan dan atau pengajian *akhwat* atau kaum ibu dapat menjadi media untuk melakukan literasi politik. Di mana terdapat perkumpulan masyarakat maka di situ juga bisa kita sertakan kegiatan kampanye literasi politik. Kita dapat melihat misalnya pembagian sajadah, mukenah, kalender, yang bermuatan kampanye partai politik pada pengajian kaum ibu. Maka kampanye literasi politik juga dapat menggunakan panggung pengajian kaum ibu dalam mendesiminasikan literasi politik pada kalangan kaum ibu di pedesaan. Kaum ibu termasuk orang yang berpengaruh di dalam keluarga sehingga kaum ibu dapat menyebarkan di dalam keluarga masing-masing.

Faktor pendukung untuk menyukseskan strategi dengan pendekatan kegiatan masyarakat adalah kegiatan ini merupakan kegiatan keseharian masyarakat. Sehingga literasi politik guna kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dalam kegiatan kemasyarakatan. Sementara itu faktor penghambatnya adalah jika masyarakat desa tidak banyak memiliki kegiatan

kemasyarakatan atau masyarakat acuh terhadap kegiatan kemasyarakatan di tempatnya.

9. Saluran Media Massa di Desa

Buletin merupakan salah satu media massa yang masih ada saat ini. Media massa baik cetak maupun elektronik, seperti koran, majalah, fotografi, radio, televisi, dan media lainnya merupakan domain publik, yang menjadikannya sebagai *public sphere* (Heryanto, 2018). Buletin sebagai alat untuk menyebarkan ide, gagasan, ajakan dan atau dakwah (Haryanto, 2016), merupakan media yang cukup diperhitungkan dalam hal ini.

Oleh karena itu perlu adanya buletin sebagai bentuk media massa di tingkat desa. Buletin sebagai saluran media di desa yang memuat informasi secara komprehensif mengenai kebijakan, peraturan perundang-undangan dan program sosial. Buletin misalnya dalam edisinya mewartakan secara mendalam mengenai Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu).

Faktor pendukung ini adalah media massa yang dapat dihadirkan di tengah masyarakat desa, misalnya diterbitkan di balai desa. Namun ada juga faktor penghambat, yaitu tidak adanya saluran media massa di desa. Jika pun ada, masyarakat tidak dapat atau tidak mau mengaksesnya.

10. Saluran Media Sosial

Media sosial yang banyak digunakan seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, saat ini *Youtube* menjadi alat atau saluran bagaimana kampanye literasi politik dapat dilakukan (Heryanto and Zarkasyi 2012). Sejumlah akun di *Instagram* dan *Twitter* seperti @pinterpolitik yang memiliki 111 ribu pengikut, mengunggah materi-materi politik di akunnya. Kemudian, @csdf_ugm atau akun Center for Digital Society di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta

yang memiliki 6.477 pengikut juga mengunggah materi-materi tentang masyarakat digital. Selain itu akun @muslimmudaindo_ memiliki pengikut sebanyak 2.060, yang menebarkan literasi ajaran-ajaran Islam.

Gerakan literasi di media sosial ini sejatinya diharapkan mampu menyebarkan literasi politik program-program sosial yang diinisiasi oleh pemerintah demi kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia. Penggunaan telepon pintar dan gawai yang menjadi bagian dari kehidupan warga di Indonesia menjadi upaya saluran media sosial dalam menebar informasi mengenai seluk beluk program-program di bidang kesejahteraan sosial. Masyarakat desa tidak sedikit yang memiliki gawai canggih yang digunakannya untuk mengakses informasi berkaitan kebijakan dan pembangunan sosial.

Faktor pendukung dalam strategi dengan saluran media sosial adalah bahwa media sosial dapat diakses dengan mudah oleh siapa pun dan di mana pun berada. Meski begitu tidak banyak masyarakat desa yang begitu peduli terhadap perkembangan zaman yang kerap menggunakan media sosial untuk kegiatan literasi politik. Ini yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi saluran media sosial.

PENUTUP

Strategi dan pendekatan-pendekatan literasi politik di atas berupaya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Strategi ini menjadi tawaran kepada para aktivis yang bergelut dalam pengembangan masyarakat desa untuk kesejahteraan sosial. Selain itu tawaran strategi ini juga disampaikan kepada para pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah hingga pemerintah desa.

Strategi literasi politik ini harus melihat dan mengatur strategi dengan sedemikian rupa

dengan mempertimbangkan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelenggaraan strategi literasi politik ini.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan bagi teman-teman pendamping program layanan sosial khusus Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah menginspirasi artikel ini. Semoga kerjasama pendampingan dalam program program kesejahteraan sosial dapat menghasilkan kemanfaatan bagi kemandirian penerima manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsanuddin, A.N., Fitrianti, A.N, Melinda, F. (2017). Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ulujiang Kecamatan Bontolempangan. *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* 13(1):140–48.
- Chambers, R. (1996). PRA: Participatory Rural Appraisal, Memahami Desa Secara Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius.
- Darajat, D.M. (2018). Melawan Ketertinggalan. Lebak: Humas Protokol Kabupaten Lebak.
- Haryanto. (2016). Pesan Dakwah Pada Buletin Jum'at Himmah IAIN Palangka Raya (Content Analysis Terhadap Edisi Juli-Desember Tahun 2015). *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 12(1):1–14.
- Heryanto, G.G. (2013). Komunikasi Politik. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Heryanto, G.G. (2018). Media Komunikasi Politik. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Heryanto, G.G., & Rumar, S.. 2013. Komunikasi Politik Sebuah Pengantar. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Heryanto, G.G. & Zarkasyi, I. (2012). Public

- Relations Politik. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Karim, A.G., Edi, A.C., Rahmawati, D., Wisiaswati, R. (2015). Memahami Tingkat Melek Politik Warga Di Kabupaten Sleman. Jpp Fisipol UGM Dan KPU Kabupaten Sleman.
- Kimbal, M. (2018). Partisipasi Politik Dalam Proses Pembangunan Desa Di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. *Sosiohumaniora* 20(3):282.
- Luttrell, C., Quiroz, S., Scrutton, C., Bird, K. (2009). *Understanding and Operationalising Empowerment*. London: Overseas Development Institute.
- Nasution, Z. (2002). *Komunikasi Pembangunan; Pengenalan Teori Dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri. (2019). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah (PP). (2014). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Kementerian Desa Dan Daerah Tertinggal.
- Rusito. (2018). *Birokrasi Profesional Pemerintah Desa*. Banten: Untirta Press.
- Suhendi, A. (2013). Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Sosio Informa* 18(02):105–16.
- Taqwarahman, C.G., Riyono, B., Setiawati, D. (2017). Peran Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Desa Karangpatihan, Kabupaten Ponorogo Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga. *Jurnal Ketahanan Nasional* 23(1):37-48.
- UU RI. (2009). Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- UU RI. (2014a). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- UU RI. (2014b). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Kementerian Desa Dan Daerah Tertinggal.
- Wijaya, S. (2019). Gerakan Literasi Dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Masyarakat Pra Sejahtera. *E-Plus* 4(2):131–145.